

Dampak Kebijakan Publik Terhadap Resiliensi dan Eskalasi UMKM di Kota Makassar: Studi Kebijakan Afirmatif, Transformasi Spasial, dan Digitalisasi Ekonomi (2020–2025)

Muhammad Nasir

nasir.achi69@gmail.com

Universitas Pejuang Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi dampak strategis kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama periode 2020–2025. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik dan data empiris ekonomi regional, studi ini menelaah efektivitas pergeseran paradigma dari intervensi sisi penawaran (*supply-side*) menuju sisi permintaan (*demand-side*), serta integrasi konsep *Smart City* dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif alokasi 50% belanja APBD dan E-Katalog Lokal berhasil menciptakan pasar terjamin (*captive market*) yang signifikan bagi UMKM formal. Program "Lorong Wisata" terbukti efektif meningkatkan pendapatan usaha mikro di tingkat akar rumput hingga 100% melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Di sektor digital, terjadi lonjakan adopsi pembayaran QRIS sebesar 171% secara *year-on-year*, meskipun masih terdapat kesenjangan literasi digital pada aspek manajemen operasional. Kendati demikian, tantangan struktural berupa kompleksitas perizinan OSS-RBA dan pemenuhan standar sertifikasi halal akibat keterbatasan infrastruktur produksi rumah tangga masih menjadi penghambat formalisasi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan fasilitas produksi bersama dan pendampingan legalitas "jemput bola" untuk memastikan inklusivitas pertumbuhan ekonomi kota.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, UMKM, Lorong Wisata, Digitalisasi Ekonomi, E-Katalog Lokal, Makassar.

Abstract

This study evaluates the strategic impact of the Makassar City Government's policies on the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) ecosystem during the 2020–2025 period. Using a public policy analysis approach and regional economic empirical data, this study examines the effectiveness of the paradigm shift from supply-side interventions to demand-side interventions, as well as the integration of the Smart City concept in local economic empowerment. Key findings indicate that affirmative policies allocating 50% of the regional budget (APBD) and the Local E-Catalogue successfully created a significant captive market for formal MSMEs. The "Lorong Wisata" (Tourism Alley) program has proven effective in increasing micro-enterprise income at the grassroots level by up to 100% through a community-based tourism approach. In the digital sector, there was a surge in QRIS payment adoption by 171% year-on-year, although digital literacy gaps persist in operational management aspects. Nevertheless, structural challenges such as the complexity of OSS-RBA licensing and compliance with halal certification standards due to limited household production infrastructure remain barriers to formalization. This study recommends the establishment of shared production facilities and proactive legality assistance to ensure the inclusivity of the city's economic growth.

Keywords: Public Policy, MSME, Lorong Wisata, Economic Digitalization, Local E-Catalogue, Makassar.

Latar Belakang

Kota Makassar, sebagai episentrum ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), memegang peranan vital dalam arsitektur perdagangan dan jasa nasional. Struktur ekonomi kota ini sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang secara historis telah membuktikan resiliensinya dalam menghadapi guncangan ekonomi, mulai dari krisis finansial 1998 hingga pandemi global COVID-19. Dalam periode observasi 2020 hingga 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah visi "Makassar Sombere & Smart City" telah meluncurkan serangkaian intervensi kebijakan yang radikal, bergeser dari pendekatan konvensional yang bersifat *charity* menuju pendekatan teknokratis yang berfokus pada penciptaan ekosistem pasar dan transformasi digital.

di Makassar tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data menunjukkan bahwa sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi penyangga utama stabilitas sosial ekonomi masyarakat urban.³ Namun, transisi menuju ekonomi digital dan tuntutan standardisasi global menghadirkan tantangan multidimensi yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan presisi.

Periode 2020-2025 menandai era "Rekonstruksi Ekonomi" bagi Makassar. Kebijakan pemerintah daerah tidak lagi berjalan secara *silo*, melainkan terintegrasi dalam kerangka kerja *Smart City* yang menggabungkan kearifan lokal (*Sombere*) dengan teknologi informasi. Kebijakan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari rekayasa sosial melalui program "Lorong Wisata", afirmasi anggaran belanja daerah, hingga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam efektivitas, dampak, dan tantangan dari rangkaian kebijakan tersebut. Analisis dilakukan dengan meninjau data empiris, dokumen regulasi, dan studi kasus di lapangan untuk memberikan gambaran holistik mengenai posisi UMKM Makassar dalam peta ekonomi kontemporer. Fokus utama diletakkan pada korelasi antara intervensi pemerintah dengan peningkatan omzet, akses pasar, dan formalisasi usaha.

Kajian Pustaka

Paradigma Baru Kebijakan Sisi Permintaan (*Demand-Side Policy*): Afirmasi Belanja Pemerintah.

Salah satu terobosan fundamental dalam kebijakan ekonomi Kota Makassar adalah pergeseran fokus dari sekadar penguatan sisi penawaran (*supply-side*) seperti pelatihan produksi menuju intervensi agresif pada sisi permintaan (*demand-side*). Pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa hambatan terbesar UMKM bukan hanya pada kemampuan memproduksi, melainkan pada kepastian penyerapan pasar.

Mandat Alokasi 50% Belanja APBD. Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan kebijakan wajib alokasi 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri, khususnya produk UMKM lokal.

Kebijakan ini menciptakan apa yang disebut sebagai *captive market* atau pasar terjamin bagi pelaku usaha lokal. Dengan total nilai transaksi pengadaan elektronik yang mencapai angka signifikan—tercatat Rp645 miliar dalam satu periode pelaporan—potensi likuiditas yang masuk ke kas UMKM sangatlah besar.⁷ Strategi ini dirancang untuk memutus kebocoran ekonomi (*economic leakage*) di mana anggaran daerah sebelumnya seringkali mengalir ke vendor-vendor besar di luar daerah atau bahkan ke produk impor.

Digitalisasi Pengadaan: E-Katalog Lokal sebagai "Marketplace" Pemerintah

Mekanisme utama penyaluran belanja 50% tersebut adalah melalui E-Katalog Lokal. Platform ini berfungsi sebagai *marketplace* resmi pemerintah yang memungkinkan transparansi dan efisiensi pengadaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar mencatat kinerja positif dalam adopsi sistem ini.

Tabel 2.1: Kinerja dan Indikator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Indikator	Capaian/Status	Keterangan & Implikasi
Target Belanja Lokal	50% dari APBD	Mandat regulasi untuk menjamin pasar UMKM
Nilai Transaksi Elektronik	Rp 645 Miliar	Menunjukkan skala likuiditas yang tersedia bagi vendor local
Peringkat Nasional	Peringkat 2	Indikator transparansi dan adopsi sistem <i>e-procurement</i>
Transaksi Komoditas Spesifik	Rp 27 Miliar (Baju Bodo)	Contoh sukses sektor kriya/tekstil masuk rantai pasok pemerintah
Indeks Tata Kelola (ITKP)	76,33 (Baik)	Menunjukkan kesiapan birokrasi dalam mengelola vendor UMKM

Data pada Tabel 2.1 memperlihatkan keberhasilan sektor spesifik, seperti pengrajin Baju Bodo, yang berhasil membukukan transaksi hingga Rp27 miliar melalui katalog elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan *demand-side* mampu memberikan dampak *real* terhadap omzet usaha mikro yang sebelumnya hanya mengandalkan pasar ritel konvensional.

Tantangan Aksesibilitas bagi Usaha Mikro

Meskipun peluang terbuka lebar, mekanisme E-Katalog mengharuskan standar kepatuhan administrasi yang tinggi. Pelaku UMKM dituntut untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta kemampuan teknis untuk mengoperasikan antarmuka digital LKPP.¹⁰ Bagi usaha kategori "Mikro", persyaratan ini seringkali menjadi *barrier to entry*. Terdapat kesenjangan kapasitas antara UMKM yang sudah "melek administrasi" dengan mayoritas usaha mikro yang masih beroperasi secara informal. Tanpa pendampingan intensif untuk *onboarding* ke sistem digital, kue anggaran APBD berisiko hanya dinikmati oleh segmen usaha "Kecil" dan "Menengah" yang sudah mapan, meninggalkan usaha "Mikro" tetap di pinggiran.

Revitalisasi Ekonomi Berbasis Ruang: Program Lorong Wisata (Longwis)

Jika kebijakan belanja APBD menyasar UMKM formal, maka kebijakan "Lorong Wisata" (Longwis) adalah strategi *grassroot* yang menyasar ekonomi informal di permukiman padat penduduk. Program ini merepresentasikan inovasi kebijakan publik yang unik di Makassar, menjadikan lorong (gang) sebagai unit basis pembangunan ekonomi.

Evolusi Konsep dan Kerangka Regulasi

Program Lorong Wisata bukanlah inisiatif yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil evolusi panjang dari program "Lorong Garden" (2014) dan "Lorong Bersih". Pada tahun 2022, program ini melembaga melalui **Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata**.¹¹ Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi penganggaran dan intervensi lintas sektoral di lorong-lorong kota.

Filosofi dasarnya adalah *Community Based Tourism* (CBT). Berbeda dengan pariwisata massal yang kapitalistik, CBT menempatkan warga lorong sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama. Program ini mengintegrasikan *urban farming* (ketahanan pangan) dengan atraksi wisata kuliner dan kriya. Target ambisius 5.000 Lorong Wisata dicanangkan untuk menciptakan ribuan inkubator bisnis baru di tengah permukiman.

Analisis Dampak Ekonomi Mikro: Studi Kasus

Efektivitas program ini terlihat dari data pendapatan riil pelaku usaha di dalam lorong. Penelitian lapangan di "Lorong Kyoto" dan lorong-lorong lainnya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan pasca-intervensi pemerintah. Intervensi ini meliputi perbaikan infrastruktur lorong, pengecatan mural, pelatihan branding, hingga eksposur media.

Tabel 3.1: Dampak Program Lorong Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Kasus Lorong Kyoto)

Jenis Usaha/UMKM	Pendapatan Awal (Pra-Program)	Pendapatan Akhir (Pasca-Program)	Peningkatan (%)	Analisis Kausalitas
Penyewaan Baju Bodo	Rp 2.500.000 / bulan	Rp 4.000.000 / bulan	60%	Peningkatan kunjungan wisatawan lokal/tamu dinas membutuhkan kostum foto.
Pancake Durian	Rp 5.000.000 / bulan	Rp 6.000.000 / bulan	20%	Eksposur sebagai kuliner khas lorong meningkatkan penjualan <i>take-away</i> .
Penjual Kue Baruasa	Rp 2.000.000 / bulan	Rp 2.800.000 / bulan	40%	Branding produk lokal sebagai oleh-oleh khas lorong.
Penjual Gorengan	Rp 200.000 / hari	Rp 400.000 / hari	100%	Peningkatan <i>foot-traffic</i> (lalu lintas pejalan kaki) di dalam lorong.
Kue Surabe	Rp 750.000 / bulan	Rp 1.500.000 / bulan	100%	Diversifikasi produk dan akses pasar langsung ke pengunjung.
Sanggar Seni	N/A	N/A	25%	Permintaan pertunjukan penyambutan tamu

				pemerintah/wisatawan.
--	--	--	--	-----------------------

Data di atas mengkonfirmasi tesis bahwa intervensi spasial (perbaikan lorong) berkorelasi positif dengan *traffic* pengunjung, yang pada gilirannya mengontrol omzet usaha mikro. Kenaikan pendapatan hingga 100% pada pedagang kecil (gorengan dan kue tradisional) menunjukkan bahwa program ini sangat efektif bagi lapisan ekonomi terbawah (*bottom of the pyramid*).

Integrasi Smart City.

Keunikan Longwis adalah integrasinya dengan visi *Smart City*. Lorong-lorong ini tidak hanya dipercantik secara fisik, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur digital seperti CCTV untuk keamanan dan akses WiFi publik. Bahkan, terdapat inisiatif visioner untuk memasukkan Lorong Wisata ke dalam *Makassar Metaverse* (Makaverse), memungkinkan kunjungan virtual yang berpotensi membuka pasar global. (Ramlan, 2024)

Namun, keberlanjutan program ini menghadapi tantangan klasik pemberdayaan masyarakat.

1. **Ketergantungan Top-Down:** Program ini sangat didorong oleh instruksi Wali Kota (Danny Pomanto). Terdapat risiko penurunan antusiasme warga jika tekanan dari pemerintah berkurang atau terjadi pergantian kepemimpinan.
2. **Kesenjangan Keterlibatan:** Tidak semua warga lorong berpartisipasi aktif. Seringkali beban pemeliharaan lorong jatuh pada segelintir tokoh masyarakat, yang dapat menimbulkan kelelahan sosial (*social fatigue*).
3. **Keterbatasan Anggaran:** Pengembangan ribuan lorong membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar, yang tidak selamanya dapat ditanggung oleh APBD, menuntut kemandirian komunitas yang belum sepenuhnya terbentuk.

Transformasi Digital: Pembayaran, Pemasaran, dan Paradoks Literasi

Sejalan dengan tren global, digitalisasi menjadi pilar utama strategi pengembangan UMKM Makassar. Sinergi antara Pemerintah Kota, Bank Indonesia (BI), dan sektor perbankan telah menciptakan ekosistem pembayaran digital yang sangat progresif. Pelaku UMKM di Makassar pada umumnya telah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kelancaran usahanya. misalnya untuk system transaksi dan e-commerce. (Hendriadi. Al kausar. Ikawidjaja, 2024)

Tantangan Partisipasi.

Menjadi suatu tantangan bagi pengambil Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi mudah dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pendidikan tinggi dan para alumninya harus menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya setidaknya 10 persen alumni perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja. (Nasir et al., 2020)

Revolusi Pembayaran Nontunai (QRIS)

Makassar mencatat tingkat adopsi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang fenomenal. Data Bank Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam penggunaan kanal pembayaran ini.

Tabel 4.1: Statistik Adopsi QRIS dan Transaksi Digital di Sulawesi Selatan (Dominasi Makassar)

Indikator	Data Tahun 2024	Pertumbuhan (Year-on-Year)	Keterangan
Volume Transaksi	78 Juta Transaksi	171%	Lonjakan aktivitas transaksi frekuensi tinggi
Nominal Transaksi	Rp 10,3 Triliun	174%	Nilai ekonomi riil yang terdigitalisasi
Jumlah Pengguna (User)	1,225 Juta Pengguna	14,62%	Perluasan basis konsumen digital
Jumlah Merchant	1,098 Juta Merchant	18%	Didominasi oleh UMKM (73,48%)
Konsentrasi Geografis	458.448 Merchant di Makassar	Dominan	Hampir setengah merchant Sulsel berada di Makassar

Angka pertumbuhan volume transaksi sebesar 171% mengindikasikan bahwa QRIS telah menjadi norma baru dalam transaksi ritel di Makassar. Bagi UMKM, ini membawa manfaat ganda: efisiensi operasional (tidak perlu uang kembalian) dan, yang lebih strategis, penciptaan jejak digital (*digital footprint*). Rekam jejak transaksi ini menjadi aset berharga bagi UMKM untuk membuktikan kredibilitas arus kas mereka kepada lembaga keuangan (Bank) tanpa perlu pembukuan manual yang rumit.

Kesenjangan Digital (*Digital Divide*) dan Literasi

Meskipun adopsi alat pembayaran digital tinggi, penelitian menunjukkan adanya paradoks dalam transformasi digital UMKM Makassar. Digitalisasi masih terkonsentrasi pada aspek "hilir" (pembayaran dan pemasaran media sosial dasar), sementara aspek "hulu" (manajemen rantai pasok, produksi berbasis teknologi, dan pembukuan digital) masih tertinggal. Studi dari *Journal of Banking and Finance Management* dan sumber lain mengidentifikasi Rendahnya Literasi Digital Lanjutan sebagai penghambat utama.³ Banyak pelaku UMKM mampu menggunakan WhatsApp atau QRIS, namun gagap ketika dihadapkan pada analisis data pelanggan, pemasaran digital berbasis algoritma, atau manajemen inventaris berbasis *cloud*. Faktor penyebab utamanya adalah:

- 1. **Hambatan Biaya:** Persepsi bahwa teknologi canggih membutuhkan modal besar.
- 2. **Kesenjangan Keterampilan:** Pelatihan yang ada seringkali bersifat umum (sosialisasi), bukan pelatihan teknis mendalam yang sesuai kebutuhan spesifik industri.

Ekosistem Pembiayaan: Akses Modal dan Distribusi Sektoral

Permodalan tetap menjadi isu klasik yang ditangani melalui berbagai skema, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen primadona.

Kinerja Penyaluran KUR

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Makassar sebagai kontributor utamanya, mencatat prestasi luar biasa dalam penyaluran KUR. Pada tahun 2023, realisasi KUR mencapai Rp15 triliun, angka tertinggi di luar Pulau Jawa.¹⁶ Hingga pertengahan 2024, tren ini berlanjut dengan pertumbuhan penyaluran sebesar 44,04% (yoy) mencapai Rp10,16 triliun.

Perbankan, khususnya BRI dan BPD Sulselbar, memainkan peran sentral. Digitalisasi proses pengajuan dan verifikasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) telah mempercepat akad kredit bagi ratusan ribu debitur.

Ketimpangan Sektoral

Meskipun nominal penyaluran besar, terdapat kritik mengenai kualitas distribusinya. Data menunjukkan bahwa penyaluran KUR di Makassar sangat terkonsentrasi pada **Sektor Perdagangan**. Sektor produktif seperti industri pengolahan (kerajinan, makanan olahan) dan sektor pertanian/perikanan (di wilayah pinggiran kota) mendapatkan porsi yang lebih kecil. Kondisi ini berisiko menciptakan pertumbuhan ekonomi yang rapuh, di mana pembiayaan lebih banyak memutar barang jadi (konsumtif) daripada membiayai penciptaan nilai tambah (*value creation*). Kementerian UMKM melalui inisiatif *Entrepreneur Hub Financial* (EHF) 2025 di Makassar berupaya mengatasi ini dengan mempertemukan wirausaha produktif dengan opsi pendanaan alternatif di luar perbankan konvensional.

Hambatan Struktural: Labirin Regulasi dan Sertifikasi

Di balik narasi sukses pertumbuhan dan digitalisasi, UMKM Makassar menghadapi "tembok tebal" dalam hal kepatuhan regulasi. Upaya formalisasi usaha seringkali terbentur pada realitas lapangan yang kompleks.

Kompleksitas OSS-RBA

Penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagai gerbang tunggal perizinan nasional menghadapi tantangan implementasi di tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Makassar melaporkan banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait kebingungan dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tingkat risiko usaha.¹⁹ Sistem yang seharusnya mempermudah justru menjadi momok bagi pelaku usaha mikro yang gagap teknologi. Tanpa NIB yang diterbitkan OSS, UMKM tidak bisa mengakses KUR, tidak bisa masuk E-Katalog, dan tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ini menciptakan lingkaran setan informalitas.

Krisis Sertifikasi Halal

Mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menargetkan kewajiban sertifikasi halal (tenggat waktu Oktober 2024 yang disesuaikan) menjadi tantangan berat bagi industri kuliner Makassar. LPPOM MUI Sulsel dan Ombudsman RI menyoroti beberapa kendala struktural yang sulit diatasi dalam waktu singkat

Produk makanan tradisional menghadapi tantangan struktural, termasuk fasilitas produksi

yang terbatas, dokumentasi bahan baku yang tidak memadai, berproduksi di dapur rumah tangga yang menyatu dengan aktivitas sehari-hari (mandi, cuci, kakus, hewan peliharaan). Standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mensyaratkan fasilitas produksi yang terpisah dan steril dari Najis, Program sertifikasi gratis (Sehati) memiliki kuota terbatas dan hanya untuk jalur *self-declare* yang berisiko tinggi jika tidak diverifikasi dengan benar. Sertifikasi reguler berbayar dianggap terlalu mahal dan akses terbatas terhadap informasi terkait Sistem Jaminan Halal (SJPH). (Sapsuha, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Makassar memiliki dampak transformatif namun asimetris terhadap UMKM.

1. **Dampak Fiskal Positif:** Kebijakan alokasi 50% belanja APBD dan E-Katalog Lokal berhasil menyuntikkan likuiditas besar ke sektor UMKM, namun manfaat terbesarnya dinikmati oleh UMKM yang sudah memiliki kesiapan administratif (kelas menengah).
2. **Sukses Pemberdayaan Spasial:** Program Lorong Wisata terbukti efektif secara empiris meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 100%, membuktikan keberhasilan model pembangunan ekonomi inklusif berbasis komunitas.
3. **Paradoks Digital:** Terjadi kesenjangan antara kemajuan sistem pembayaran (QRIS) yang sangat pesat dengan kemandekan dalam digitalisasi manajemen dan legalitas. UMKM Makassar sudah "Digital dalam Transaksi" namun belum sepenuhnya "Digital dalam Operasional".
4. **Hambatan Regulasi:** OSS dan Sertifikasi Halal menjadi *bottleneck* utama yang menahan laju formalisasi usaha mikro, menciptakan risiko eksklusi bagi pelaku usaha yang paling rentan.

Rekomendasi Kebijakan (Policy Prescriptions)

Untuk mengoptimalkan dampak kebijakan di masa depan, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Jangka Pendek (1 Tahun):

- 1) **Gugus Tugas "Jemput Bola" Legalitas:** Membentuk tim *task force* gabungan (Dinas Koperasi, PTSP, Kemenag) yang turun langsung ke Lorong Wisata untuk layanan *on-the-spot* pembuatan NIB dan pendaftaran halal, mengatasi hambatan teknis penggunaan aplikasi OSS.
- 2) **Kurikulum Inkubasi Terpadu:** Mengubah model pelatihan dari sosialisasi massal menjadi inkubasi intensif yang mewajibkan peserta menghasilkan *output* konkret (misal: selesai pelatihan harus sudah punya toko online aktif dan pembukuan digital).

2. Jangka Menengah (2-3 Tahun):

- 1) **Rumah Produksi Bersama (Shared Factory):** Pemerintah Kota perlu

membangun sentra dapur bersama di tiap kecamatan yang telah tersertifikasi halal dan higienis. UMKM lorong dapat menyewa fasilitas ini secara *shift* untuk berproduksi, mengatasi kendala sertifikasi halal akibat dapur rumah tangga yang tidak layak.

- 2) **Diversifikasi Sektor KUR:** Bekerjasama dengan OJK dan TPAKD untuk memberikan insentif khusus bagi penyaluran KUR ke sektor produksi dan pertanian perkotaan, mengurangi dominasi sektor perdagangan.

3. Jangka Panjang (5 Tahun):

- 1) **Institusionalisasi Lorong Wisata:** Membuat Peraturan Daerah (Perda) yang lebih permanen untuk Lorong Wisata guna menjamin alokasi anggaran dan keberlanjutan program melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini.
- 2) **Integrasi Big Data UMKM:** Menggabungkan data OSS, data transaksi QRIS, dan data E-Katalog menjadi satu *dashboard* analitik tunggal untuk pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy making*).

Bibliografi

Detail Peraturan - JDIH KOTA MAKASSAR, diakses Januari 28, 2026, <https://jdih.makassarkota.go.id/produk-hukum/peraturan/detail/peraturan-walikota-makassar-nomor-37-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-program-peningkatan-lorong-garden-dan-pemenuhan-lima-ribu-lorong-wisata>

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Sediakan Sertifikasi Halal Gratis untuk 20 UMKM pada 2024 - Terasnews.id, diakses Januari 28, 2026, <https://terasnews.id/dinas-koperasi-dan-umkm-kota-makassar-sediakan-sertifikasi-halal-gratis-untuk-20-umkm-pada-2024/html>

Dinas PM-PTSP Gelar Rakor Terkait SOP dan Pelatihan OSS Berbasis Resiko, diakses Januari 28, 2026, <https://www.mediasulsel.com/dinas-pm-ptsp-gelar-rakor-terkait-sop-dan-pelatihan-oss-berbasis-resiko/>

Dukung Produk Dalam Negeri, Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Belanja untuk UMKM Lokal - ruminews, diakses Januari 28, 2026, <https://ruminews.id/2025/11/01/dukung-produk-dalam-negeri-pemkot-makassar-tegaskan-komitmen-belanja-untuk-umkm-lokal/>

Hendriadi. Al kausar. Ikawidjaja, Natali. M. (2024). Study UMKM di Makassar: Mengatasi Tantangan Melalui Transformasi Digital dan Strategi Inovasi. *Manajemen Keuangan Perbankan Nitro*, 8(1), 94–100.

Inovasi Digital Makassar Smart City untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkelanjutan Localise SDGs Indonesia, diakses Januari 28, 2026, <https://www.localisedsgs-indonesia.org/beranda/cs/inovasi-digital-makassar-smart-city-untuk-mendukung-pelayanan-publik-yang-berkelanjutan>.

Implementasi Program Lorong Wisata ..Repository IPDN, diakses Januari 28, 2026,

http://eprints.ipdn.ac.id/23854/1/32.0886_ELZA%20REZKY%20SAPUTRYREPOSITORY.pdf

Madjid, Ramlan. Salman, A.R. Strategi Keberlanjutan Inovasi Perkotaan: Studi Kasus Pengembangan “Lorong Wisata Sydney” Di Kota Makassar Sustainability, diakses Januari 28, 2026, <https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/admit/article/download/3215/221/17866>

Nasir, M., Musa, C. I., Thahir, T., & Tahmir, S. (2020). Determinant Factors Of Small And Medium-Sized Enterprises Investments And Its Impact On Economic Growth Of South Sulawesi. IOSR Journal Of Business and Management, 22(6), 45–49. <https://doi.org/10.9790/487X-2206064549>

Pemkot Makassar Sediakan 50% Anggaran untuk Produk Lokal, Belanja UMKM, diakses Januari 28, 2026, <https://makassarkota.go.id/2025/09/pemkot-makassar-sediakan-50-anggaran-untuk-produk-lokal-belanja-umkm/>

Pemkot Makassar Terus Memperkuat Keberpihakan ke UMKM, diakses Januari 28, 2026, <https://sulselmengabari.com/2025/11/pemkot-makassar-terus-memperkuat-keberpihakan-ke-umkm/>

Pemprov Sulsel catat transaksi katalog elektronik lokal Rp824 miliar - ANTARA News, diakses Januari 28, 2026, <https://www.antaranews.com/berita/3641109/pemprov-sulsel-catat-transaksi-katalog-elektronik-lokal-rp824-miliar>

Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lorong Wisata, diakses Januari 28, 2026, <https://jdih.makassarkota.go.id/produk-hukum/peraturan/detail/-peraturan-walikota-makassar-nomor-94-tahun-2022-tentang-pembentukan-lorong-wisata>

Penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp10,16 triliun, tumbuh 44 persen, diakses Januari 28, 2026, <https://sulsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/17.-Penyaluran-KUR-di-Sulsel-mencapai-Rp1016T.pdf>

Sapsuha, M. Ummah. S. N. B. M. C. (2025). Challenges Of Halal Certification For Traditional Food MSMEs: A Case Study Off Halua Kenari D&J. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 165–180.

Strategi UMKM Masuk Ke E-Katalog LKPP Dengan Mudah - Linkeu Pemda, diakses Januari 28, 2026, <https://www.bimtekpemda.com/materi/strategi-umkm-masuk-ke-e-katalog-lkpp-dengan-mudah/>

Tim Asesor Evaluasi Program Smart City Akui Kepopuleran Makassar Sombere and Smart City - Diskominfo Kota Makassar, diakses Januari 28, 2026, <https://diskominfo.makassarkota.go.id/tim-asesor-evaluasi-program-smart-city-akui-kepopuleran-makassar-sombere-and-smart-city/>

Tumbuh Signifikan! Pengguna QRIS di Sulsel Capai 1,2 Juta, Transaksi... - SINDOmakassar,

diakses Januari 28, 2026, <https://sindomakassar.com/read/ekbis/15457/tumbuh-signifikan-pengguna-qris-di-sulsel-capai-12-juta-transaksi-tembus-rp103-triliun-1739271755>

Transaksi QRIS di Sulsel Naik 171%, Capai Rp10,3 Triliun pada 2024 - Linisiar.id, diakses Januari 28, 2026, <https://linisiar.id/transaksi-qris-di-sulsel-naik-171-capai-rp103-triliun-pada-2024/>

Wajib Halal Oktober 2024 untuk UMK Ditunda, Ini Tanggapan LPPOM Sulsel, diakses Januari 28, 2026, <https://muisulsel.or.id/wajib-halal-oktober-2024-untuk-umk-ditunda-ini-tanggapan-lppom-sulsel/>